

## **Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Kepegawaian Dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado**

*Evaluation of Regional Budget Realization Report based on Government Regulation Number 71 of 2010 at the Manado City Human Resources Development and Personnel Agency*

**Angielya Paskaniata Kandioh<sup>1</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, dan Lidia M. Mawikere<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : [angielyapaskaniata@gmail.com](mailto:angielyapaskaniata@gmail.com)<sup>1</sup>, [Jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:Jennymorasa@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>,

[lidiamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiamawikere@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Tingkat keberhasilan penganggaran biasanya dapat diukur dengan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah laporan realisasi anggaran belanja yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

**Kata kunci:** Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

**Abstract:** *Government accounting provides information in managerial processes such as planning, budgeting, implementation, supervision, budget control, policy formulation, decision making, and assessment of government performance on public finances. The success rate of budgeting can usually be measured by the creation of budget realization reports. Budget Realization Report is a report that presents an overview of the source, allocation, and use of financial resources managed by local governments, which describes the comparison between the budget and its realization in a reporting period. This study aims to analyze whether the budget realization report at the Manado City Human Resources Development and Personnel Agency is based on Government Regulation Number 71 of 2010. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the Regional Expenditure Budget Realization Report at the Manado City Human Resources Development and Personnel Agency was in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010*

**Keyword :** *Government Accounting, Budget Realization Report, Government Regulation Number 71 of 2010*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia ekonomi sekarang ini peranan akuntansi sangat penting untuk sesuatu usaha agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporant ransaksi–transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi–transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak–pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Tujuan pokok daria kuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Diterima: 28-10-2023; Disetujui untuk Publikasi: 04 -11-2023

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu hak, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diaplikasikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2010 sudah harus sesuai dengan SAP. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan daerah, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah (Hartati, 2020 :2).

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1 berbunyi, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Saat ini banyak pemerintah daerah yang sudah mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri, namun ada juga pemerintah daerah yang belum mampu mengelola kinerja keuangan daerahnya.

Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Kebijakan akuntansi secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat keberhasilan penganggaran biasanya dinilai berdasarkan keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja yang dapat diukur dengan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan (Fitra, 2019:13). Informasi dari laporan realisasi anggaran berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BPKSDM) Kota Manado merupakan

lembaga atau instansi pelayanan publik yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang manajemen pegawai negeri sipil daerah. Tentunya dalam menjalankan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado menggunakan anggaran belanja dari pemerintah, sehingga anggaran harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran agar dapat dilihat apakah anggaran sudah dipakai dengan semestinya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan menghindari berbagai macam tindak kecurangan, maka dalam melakukan pengelolaan keuangan harus dengan baik, akuntabel dan transparan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado.

### **Definisi Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut Hartono dan Rahmi (2018 : 2). Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan memproses informasi mengenai aktivitas bisnis suatu entitas menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasil usaha perusahaan kepada para pengambil keputusan Nataherwin dan Widyasari (2018 : 10).

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya ( Sujarweni, 2021 : 18)

### **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan disuatu daerah. Didalam APBD tercemin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber – sumber kekayaan daerah.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Fauziah 2018:43). Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Tamawale Majampoh, Christian Datu (2021) yang berjudul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kec. Malalayang Kota Manado. Dengan hasil penelitian bahwa Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kecamatan malalayang sudah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan telah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza (2021) yang berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Dengan hasil penelitian bahwa Penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat

kesesuaian mencapai 100% dengan menggunakan rumus Dean J. Champion.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kartini A.T Palilingan, Hendrik Manossoh, Lidia M. Mawikere (2020) yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan kriteria efektif dan efisien realisasi anggaran pada dinas social menurut KEMENDAGRI NO.690.900-327 Tahun 1996

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan laporan realisasi anggaran yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Manado, yang berlokasi di Jl Balai Kota No.1, Tikala Ares Kec. Tikala Kota Manado. Waktu penelitian dimulai bulan Desember 2022 sampai selesai

### **2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Manado.

#### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado berupa hasil wawancara dengan narasumber bagian keuangan yaitu tentang laporan realisasi anggaran dan dokumentasi data laporan realisasi anggaran tahun 2022 di BKPSDM Kota Manado.

Data Sekunder yaitu data hasil dokumentasi yang diperoleh melalui media perantara yang berupa internet ,buku, atau penelitian sebelumnya yang dipublikasikan secara umum.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa gambaran umum ,visi dan misi BKPSDM Kota Manado.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung untuk memperoleh data yang tepat dan akurat dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado, kemudian hasil wawancara tersebut dicatat.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, internet, arsip dan dokumen yang dapat mendukung penelitian. Dokumen yang dikumpulkan yaitu gambaran umum, sejarah, visi dan misi, susunan organisasi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado.

### **2.4 Metode dan Proses Analisis**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

### **Proses Analisis**

Berikut proses analisis dalam penelitian ini:

1. Pertama, peneliti mengumpulkan data dan informasi mengenai belanja di dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 yang ada pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Kota Manado.
2. Selanjutnya data mengenai Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado terkumpul, peneliti akan menganalisis data.
  - 1) Analisis mengenai Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022.
  - 2) Analisis hasil wawancara mengenai Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado pada tahun 2022.
3. Setelah data dan di informasi laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado diolah dan dianalisis, selanjutnya akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku.
4. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado**

Prosedur adalah berbagai kegiatan administrasi yang melibatkan banyak sumber daya manusia untuk mencapai tindakan yang sama dalam melakukan suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin. Lewat prosedur, informasi bisa terkumpul serta di informasikan kepada yang memerlukannya. Laporan Realisasi Anggaran berfungsi sebagai perwujudan dari berjalan tidaknya kegiatan-kegiatan dan program-program dari suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado diharapkan efektif, efisien dan hemat dengan lewat prosedur yang pas. Adapun hasil kegiatan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan yakni Ibu Fiane Kambey SE, bahwasanya beliau mengatakan :

“Laporan Realisasi Anggaran disusun secara otomatis melalui sistem yang digunakan untuk menginput SPP/SPM yang telah di SP2D, kemudian tercatat di laporan realisasi perbulan/triwulan/ tahun anggaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado ini ialah bidang keuangan. Pelaporan LRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah dilakukan secara transparan dan informasi tentang LRA mudah untuk diketahui masyarakat. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM dinilai belum efisien karena masih menggunakan dua sistem. Dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran ini terdapat beberapa kendala baik dari segi penyusunan maupun pencapaian. Kendala dalam proses penyusunan terjadi jika ada maintenance sistem/jaringan buruk. Biasanya juga terjadi dari faktor *human error*, namun sangat jarang terjadi.

## **Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

Penerapan ini dilakukan dengan membandingkan antara LRA yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 No 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang persyaratan-persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dalam Laporan Realisasi Anggaran yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado Tahun 2022, anggaran yang ada pada tahun 2022 berjumlah Rp12.537.610.586,00 dan jumlah belanja yang terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.905.263.548,00. Laporan realisasi anggaran yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Manado menyediakan informasi realisasi belanja, surplus/ defisit dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran dan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pos belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado terbagi 2 yakni belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dalam hal ini belanja pegawai dan belanja barang atau jasa. Sedangkan belanja modal yakni belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja pegawai yang dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado tahun 2022 sebesar Rp6.440.940.550,00 dan yang terealisasi sebesar Rp6.031.726.938,00. Belanja Pegawai tersebut mencakup belanja gaji pokok, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, belanja tunjangan fungsional, belanja tunjangan beras PNS, belanja tunjangan PPh, belanja honorarium, belanja pembulatan gaji PNS. Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sebesar Rp5.278.874.680,00 dan yang terealisasi sebesar Rp4.116.898.174,00. Belanja Barang dan jasa tersebut mencakup belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga supir, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja alat dan tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja perabot kantor, belanja bahan komputer, belanja jasa konversi, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas biasa, belanja bahan bakar dan pelumas.

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sebesar Rp702.479.356,00 dan yang terealisasi sebesar Rp645.624.436,00. Belanja modal peralatan dan mesin mencakup belanja modal alat pendingin, mebel, personal komputer. Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado berjumlah Rp115.316.000 dan yang direalisasikan sebesar Rp111.014.000,00. Belanja modal aset tetap lainnya mencakup belanja modal audio visual.

### **Pembahasan**

#### **Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado**

Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran diatas maka dapat diketahui penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah sangat baik, dengan menyediakan informasi LRA, menyediakan informasi belanja yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos belanjanya, menyediakan informasi transfer yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos transfer, menyediakan informasi surplus/defisit-LRA yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos surplus/defisit LRA dan menyediakan informasi pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos pembiaaannya.

Proses penyusunan LRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Manado dilaksanakan setiap bulan dan kemudian diakumulasikan pada setiap akhir periode akuntansi, hal ini dilakukan agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa dikontrol sebaik mungkin serta pada akhir periode pelaporan SiLPA dan SiKPA dipindahkan kelaporan perubahan saldo anggaran lebih. Penyusunan laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado melibatkan orang-orang berkompeten di bidang keuangan, sehingga dalam proses penyusunan LRA berjalan lebih mudah.

Sistem penginputan LRA masih menggunakan dua sistem, sehingga dinilai tidak efisien. Meskipun dalam proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem yang sering *error* pada saat menginput, namun hal itu tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado.

**Kesesuaian Laporan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

Dibawah ini merupakan perbandingan penerapan Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Realisasi Anggaran		
PP Nomor 71 Tahun 2010	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado	Keterangan
Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Kota Manado menyajikan informasi realiasi belanja, surplus/defisit-LRA, dan SiLPA/SiKPA, masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Sesuai
Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi dengan jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan, dan e. Satuan angka yang digunakan	Laporan realisasi anggaran BKPSDM Kota Manado mengidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan.	Sesuai
Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Laporan realisasi anggaran BPKSDM Kota Manado disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Sesuai
Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	BPKSDM Kota Manado menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Sesuai
Laporan Realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagaiberikut : a. Pendapatan b. Belanja c. Transfer d. Surplus/ defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto h. SiLPA/SiKPA	Laporan Realisasi Anggaran BPKSDM Kota Manado sekurang-kurangnya mencakup pos-pos berikut : a. Belanja b. Surplus/ defisit-LRA c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sesuai

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Sesuai
--	---	--------

**Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023**

Laporan Realisasi Anggaran yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado disusun secara otomatis melalui sistem yang ada, sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Kota Manado menyajikan informasi realiasi belanja, surplus/defisit-LRA, dan SiLPA/SiLKPA. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyajikan informasi berupa nama entitas, cakupan entitas laporan, periode yang dicakup, mata uang laporan dan satuan angka yang digunakan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado menyajikan laporan realisasi anggaran sekali dalam setahun. Entitas laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado disajikan setiap 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran dan anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan realisasi anggaran juga disusun oleh orang-orang berkompeten pada bidangnya. Laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah menyediakan anggaran belanja dan yang terealisasi, serta juga kita dapat melihat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Dalam laporan realisasi anggaran yang ada pada BKPSDM juga sudah menyajikan pos-pos yakni pos belanja, surplus/defisit, SiLPA/SiLKPA. Pos pendapatan, karena dalam BKPSDM Kota Manado tidak memiliki pendapatan. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, ketika menginput data masih belum efisien karena menggunakan dua sistem dan sering terjadi sistem error namun itu semua masih dapat teratasi dan tidak menjadi penghambat untuk penerapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### Saran

Saran dari penulis untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado diharapkan terus selaras ketika melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan terus mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang ada agar dalam penyajian laporan yang disusun dapat mempermudah evaluasi kinerja pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado.

### Daftar Pustaka

- Fauziah, I. 2018. Standar Akuntansi Pemerintahan. ILMU, Jakarta
- Fitra. 2019. Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah . CV IRDH. Malang
- Hartono., Rahmi. 2018. Pengantar Akuntansi. Cetakan Pertama. CV Budi Utama, Yogyakarta
- Nataherwin., Widyasari. 2018. *Akuntansi Perpajakan*. CV Rasi Terbit, Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sujarweni. 2021. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah